

ORSOSPOL MASUK KAMPUS

Teguh Tri Riyatno



Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai manifestasi pelaksanaan Demokrasi Pancasila, maka tidak dapat dipungkiri kondisi politik di Indonesia akhir-akhir ini juga menghangat. Hal itu jelas tercermin dimana dapat kita rasakan masing-masing Orsospol (PPP, GOLKAR, PDI) yang akan "berlaga" dalam ajang PEMILU 1997 telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya juga ancang-ancang target suara yang diharapkan diperoleh tentunya. Sehingga banyak jurus-jurus yang digunakan masing-masing OPP guna menarik massa, misalnya dengan konsolidasi dalam tubuh partai sendiri, pengkaderan anggota yang dapat diandalkan, penempatan calon legeslatif yang mengakar ke bawah, betul-betul dikenal oleh masyarakat serta kapasitasnya me-

oleh negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28. Sehingga atas dasar tersebut tentunya secara pribadi tidaklah menjadi masalah bila seseorang berpolitik, namun hal itu akan menjadi lain apabila dosen maupun mahasiswa berpolitik praktis dengan membawa nama, lingkungan maupun lembaga-lembaga kampus untuk kepentingan politiknya. Karena bagaimanapun kampus sebagai tempat belajar yang ilmiah haruslah dipertahankan "kesuciannya" dari pengaruh-pengaruh politik praktis seperti itu.

Dari hal diatas maka dengan adanya Orsospol yang masuk dalam kampus, saya menyatakan ketidaksetujuannya dengan berbagai alasan bahwa kampus sebagai tempat belajar dari Mahasiswa bukan ajang politik, justru kampus haruslah menjadi "juri politik" yang netral, disamping apabila hal itu benar-benar terjadi maka dapat dibayangkan betapa kampus akan terlihat terjadinya pengkotak-kotan sesuai dengan baju Orsospol masing-masing sehingga sangat bisa terjadi ketegangan dan pertentangan antar mahasiswa maupun dosen yang pada gilirannya jelas akan merusak stabilitas kampus yang merupakan syarat utama bagi berjalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini bukan berarti saya menyarankan khususnya rekan-rekan mahasiswa untuk bersikap apatis terhadap dunia politik, namun justru sebaliknya kita mestinya wajib tahu akan politik sehingga tidak mudah terpolitiki namun sekali lagi bahwa penerapan politik praktis itulah yang harus diperhatikan salah satunya tidak membawa kampus didalamnya. Bagaimanapun kedewasaan berpolitik suatu negara termasuk Indonesia sangat berkaitan masyarakatnya yang semakin maju dan matang cara berpikirnya, sehingga PEMILU sebagai wahana penyalu-

saya menyatakan ketidaksetujuannya dengan berbagai alasan bahwa kampus sebagai tempat belajar dari Mahasiswa bukan ajang politik justru kampus haruslah menjadi "juri politik" yang netral

man yang pantas dijadikan nomor urut jadi sebagai anggota legeslatif (wakil rakyat). Dan yang paling menarik adalah rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat untuk memperkuat barisan partainya sebagai JURKAM yang diharapkan dari pengaruhnya memberikan kontribusi suara yang lumayan, baik tokoh-tokoh itu dari kalangan Pejabat, Ulama, Artis, Budiyawan, Cendekiawan dan sebagainya.

Berbicara mengenai cendekiawan tentunya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya dunia Kampus. Dimana di katakan orang bahwa kampus sebagai tempat berkehidupannya orang-orang yang berpendidikan sebagai orang akademika yang ilmiah tentunya tidak lepas kaitan dengan dari salah satu menariknya kepentingan ORSOSPOL terhadap kalangan kampus ini (dosen maupun Mahasiswa). Pada dasarnya mengenai hak politik seseorang memang sudah dijamin

ran politik rakyat benar-benar dapat terwujud bukannya sekedar isapan jempol serta alat pelegitimasi agar dianggap sebagai negara yang Demokratis.

Demikianlah pokok pemikiran saya. Semoga PEMILU 1997 menjadi pesta yang benar-benar pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia dan kampus tetap menjadi garda ilmiah yang benar-benar ilmiah bagi kepentingan bangsa Indonesia. □

Penulis adalah konduktor Resmen Mahasiswa, Jagat Abilawa